

## **TATA KELOLA PERUSAHAAN**

*Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG)* adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Bank NTB Syariah selaku Bank Umum Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya Bank NTB Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholder*.

# ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

## SELF ASSESSMENT

Salah satu penilaian poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada bank. Pelaksanaan *Self Assessment* tersebut dilakukan secara periodik setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan pelaksanaan GCG di Bank NTB Syariah yang ditinjau dari tiga aspek yaitu; *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Self assessment* tersebut meliputi 11 (sebelas) factor penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
8. Penerapan Fungsi Audit Internal;
9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governancedan* Pelaporan Internal.

## PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Proses penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Bank NTB Syariah melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Kerja yang terkait dengan factor penilaian tata kelola dimaksud.

## HASIL PENILAIAN

Bank telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap tahun. Untuk penilaian GCG pada Tahun 2019, Bank NTB Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan Peringkat Komposit **2** (dua) Atau kategori predikat "**Baik**". Dengan kesimpulan sebagai berikut:

	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
<b>INDIVIDUAL</b>	<b>2,00</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>Baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

## 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### a. Governance Structure

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 2 orang dari 3 orang anggota Dewan Komisaris, yaitu : 1 orang Komisaris Utama Independen dan 1 orang Komisaris Independen.	1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses mengikuti <i>fit and proper test</i> untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	1

### b. Governance Process

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 38 kali.	-	1

### c. Governance Outcome

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, untuk kemudian disampaikan kepada Direksi sebagai bentuk Penasehatan Dewan	Selama ini pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap komposisi dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, namun masih diperlukan mekanisme	1

Komisaris.	koordinasi pemilik kepada Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional Bank.	
------------	--	--

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

### a. Governance Structure

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dan seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank	2 (dua) orang Calon anggota Direksi masih dalam proses mengikuti <i>fit and proper test</i> untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	2

### b. Governance Process

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 33 kali.	Proses Internal masih perlu ditingkatkan agar sanksi/teguran dari regulator dapat diminimalisir.	2

### c. Governance Outcome

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank	Masih terdapat denda dan temuan yang belum diselesaikan.	2

## 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

### a. Governance Structure

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Komite telah melaksanakan rapat sebanyak 36 kali yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Komite Audit sebanyak 23 (dua Puluh tiga) kali.</li> <li>- Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 (sebelas) kali.</li> <li>- Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 2 (dua) kali.</li> </ul>	-	1

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sampai tanggal laporan tidak terdapat <i>dissenting opinion</i> .	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku meskipun ada kelemahan minor namun dapat segera diselesaikan.	2

4. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kompetensi dan seluruhnya telah memperoleh surat persetujuan dari DSN MUI.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Dewan Pengawas Syariah senantiasa memberikan	-	1

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
nasihat dan saran kepada Direksi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan kesyariahan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK tepat waktu.	Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada OJK masih terdapat <i>review</i> /perlu penyesuaian kembali.	2

5. **Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa**

a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki kompetensi yang memadai tentang operasional Perbankan Syariah.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Proses pengembangan produk baru Bank telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat Opini Syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	-	1

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan SOP yang memadai.	-	1

**6. Penanganan Benturan Kepentingan**

a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi perihal Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Selama periode laporan, Bank tidak pernah mengalami Benturan Kepentingan sehingga Pengurus dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan untuk penanganannya.	-	1

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Pemilik/pihak terkait/pihak lainnya tidak pernah melakukan intervensi terhadap kegiatan Bank yang	-	1

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.		

## 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

### a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Sumber Daya Insani (SDM) pada Divisi Kepatuhan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kompetensi individu.	-	1

### b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	1

### c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan.	Terdapat pengulangan jenis pelanggaran berupa laporan eksternal yang menimbulkan denda.	2



## 8. Penerapan Fungsi Audit Intern

### a. Governance Structure

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	1

### b. Governance Process

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	-	1

### c. Governance Outcome

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah menindaklanjuti baik temuan audit internal dan eksternal (DMTL). DMTL temuan audit sampai dengan posisi Desember 2019 tersisa sejumlah 19 temuan Pihak Eksternal dan 139 temuan Pihak Internal	Masih terdapat temuan berulang.	2

## 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

### a. Governance Structure

c	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh RUPS.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	-	1

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.	-	1

**10. Batas Maksimum Penyaluran Dana**

a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, dan telah dilaksanakan monitoring secara berkala sesuai ketentuan BI/OJK.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank secara berkala telah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan	-	1

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
perundang undangan yang berlaku.		

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan Bank.	-	1

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal**

a. *Governance Structure*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	-	1

b. *Governance Process*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Bank senantiasa menyampaikan tata cara pengaduan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa kepada seluruh nasabah Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa	-	1

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan		

c. *Governance Outcome*

Faktor Penguat	Kelemahan	Nilai Komposit
Laporan pelaksanaan GCG disusun setiap tahun memuat hal-hal yang harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dapat diakses pada <i>website</i> .	-	1

**Penyebab Kelemahan (*Root Cause*) Pelaksanaan GCG**

- a. Dalam proses pelaksanaan penerapan GCG, masih terdapat beberapa kendala, yaitu:
  - 1) Kurangnya kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, yang disebabkan oleh:
    - a) Regulasi dipahami atau ditafsirkan secara keliru oleh Bank.
    - b) Bank lalai mematuhi regulasi yang berlaku.
  - 2) Masih terjadinya Tindak Fraud yang dilakukan oleh Pegawai Bank dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh lemahnya kontrol internal Bank serta kurangnya pengawasan aktif dari manajemen Bank.
  - 3) Masih terdapat pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disebabkan oleh :
    - a) Bagian operasional di Kantor Pusat dan Kantor Cabang lalai mematuhi regulasi yang berlaku.
    - b) Proses identifikasi dan pemantauan masih terbatas pada proses pemantauan penyampaian laporan yang harus disampaikan tanpa mengedepankan kesesuaian dari isi laporan dimaksud.
- b. Masih terdapat beberapa pemberitaan negatif mengenai Bank.
- c. Beberapa faktor tersebut diataslah yang menyebabkan pelaksanaan penerapan GCG tidak dapat terkelola dengan baik sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap hasil GCG.

## Langkah Perbaikan beserta Target Waktu Pelaksanaannya

No.	Langkah Perbaikan	Target Waktu
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan dan penambahan wawasan seluruh Pegawai melalui program diklat dan seminar.</li> <li>2. Komunikasi dan pembinaan dalam pemberdayaan SDI serta sosialisasi ketentuan baru di lingkungan Intern Bank.</li> <li>3. Memastikan kecukupan SDI pada seluruh jenjang Organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas.</li> </ol>	Berkelanjutan s/d Desember 2020
2.	<p>Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan <i>fraud</i>, Bank akan meningkatkan deteksi dini, investigasi, pelaporan, sanksi dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Bank juga akan mengikutsertakan Auditor beserta jajarannya dalam program seperti pelatihan <i>fraud awareness</i>, <i>audit internal</i>, <i>quality assessment</i>, <i>Know Your Employee</i>, <i>tone of the top</i>, dan lain-lain.</p>	Berkelanjutan s/d Desember 2020
3.	<p>Direksi akan meningkatkan <i>awareness</i> dari setiap Divisi/Desk/Unit Kerja terkait kewajiban pelaporan kepada OJK dan Badan Regulator Lainnya melalui sosialisasi baik secara langsung maupun elektronik dan dibantu oleh Divisi terkait, sehingga dapat menekan kelalaian pelaporan yang menimbulkan denda di semester-semester berikutnya.</p>	Berkelanjutan s/d Desember 2020
4.	<p>Manajemen akan meningkatkan <i>Performance</i> Bank dalam rangka menjaga Risiko Reputasi guna menghindari adanya pemberitaan negatif Bank.</p>	Berkelanjutan s/d Desember 2020

## **KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN**

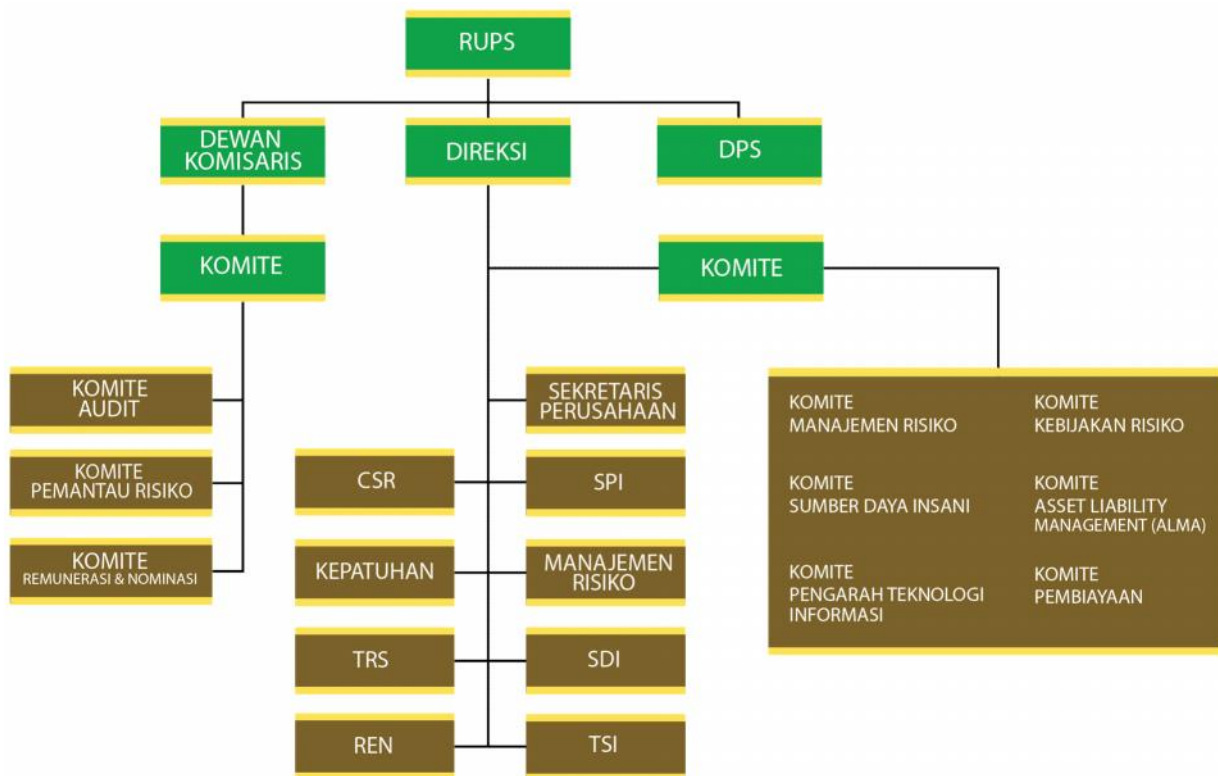
Sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, menjadikan Bank NTB Syariah sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Bank NTB Syariah senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yaitu *Transparancy* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Professional* (Independen) dan *Fairness* (Kewajaran).

Pelaksanaan GCG di Bank NTB Syariah berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penerapan praktek GCG secara menyeluruh di Bank NTB Syariah seperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB Syariah telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan GCG di **Bank NTB Syariah** berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan peraturan pelaksanaan GCG, **Bank NTB Syariah** telah memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



### Organ Utama

- ) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- ) Dewan Komisaris
- ) Direksi
- ) Dewan Pengawas Syariah

### Komite di Bawah Dewan Komisaris

- ) Komite Audit
- ) Komite Pemantau Risiko

) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite di Bawah Direksi

- ) Komite Manajemen Risiko
- ) Komite Kebijakan Risiko
- ) Komite Sumber Daya Insani
- ) Komite *Asset Liability Management* (ALMA)
- ) Komite Pengarah Teknologi Informasi
- ) Komite Pembiayaan

Organ Pendukung

- ) Desk Sekretaris Perusahaan
- ) Divisi SPI
- ) Divisi Kepatuhan
- ) Divisi Treasury
- ) Divisi Perencanaan Strategis
- ) Divisi Sumber Daya Insani
- ) Divisi Teknologi Informasi



## KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muslihun	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Nur	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2019, Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ferry Satrio	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan & Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan <i>Non Bank</i>	Perusahaan Lain
Saharuddin	Direktur Dana & Jasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## HUBUNGAN KEUANGAN DAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU ANGGOTA DIREKSI

### HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen		√		√		√		√		√		√
Muslihun	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Muhammad Nur	Komisaris		√		√		√		√		√		√

### HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kukuh Rahardjo	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Ferry Satrio	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan & Operasional		√		√		√		√		√		√
Saharuddin	Direktur Dana & Jasa		√		√		√		√		√		√

## **RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ATAU LEMBAGA LAIN**

### **PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN**

1. Dewan Komisaris Bank NTB Syariah tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada Bank (Bank Umum, BPR) dan lembaga keuangan lainnya.
2. Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

## **KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS**

### **KOMITE AUDIT**

#### **STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT**

- 1) Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang komisaris dan 3 (tiga) orang pihak independen.
- 2) Komisaris Utama Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan 1 (satu) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang pihak independen menjadi anggota Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK/01.12/64/830/2019, struktur Komite Audit terdiri dari :

- Ketua : H. Zainal Fanani/Komisaris Utama Independen
- Anggota : 1. H. Muhammad Nur/Komisaris  
2. Refreandi Haeri/Pihak Independen  
3. Bambang/Pihak Independen  
4. Iwan Triadi Agustono/Pihak Independen

#### **KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE AUDIT**

- 1) Berintegritas dan reputasi keuangan yang baik;
- 2) Memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan bidang perbankan syariah;
- 3) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- 4) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
- 5) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 6) Tidak mempunyai: (1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan/atau; (2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

## **KOMITE PEMANTAU RISIKO**

### **STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi risiko Bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Risiko terdiri 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko dan perbankan syariah.
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor SK/01.12/64/830/2019, tanggal 01 Oktober 2019 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Muslihun/Komisaris Independen
2. Anggota :
  1. Zaenal Fanani/Komisaris Utama Independen
  2. Susi Retna Cahyaningtyas/Pihak Independen
  3. Kamaruddin Nur/Pihak Independen

### **KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO**

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko terdiri 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko dan perbankan syariah.
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;

- b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
- c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- 6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 7. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- 8. Komite Pemantau risiko mempunyai hubungan kerja dengan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 9. Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Pengawas Intern Bank.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko sebagai panduan Komite dan anggotanya dalam melaksanakan tugas, adapun tugas Komite Pemantau Risiko adalah:

Tugas Utama:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya
2. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Tugas Lainnya:

1. Evaluasi Laporan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi.
3. Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
4. Evaluasi Laporan GCG.
5. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank.
6. Evaluasi laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
7. Menyusun laporan tahunan Komite Pemantau Risiko untuk dimuat dalam *annual report* Bank.
8. Melakukan kegiatan administrasi, evaluasi, maupun analisis terhadap beberapa permasalahan Bank sesuai penugasan Dewan Komisaris.

## **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

### **STRUKTUR ORGANISASI KOMITE**

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor SK/01.12/64/028/2018, tanggal 01 Oktober 2018 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah dengan susunan sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan
1.	H. Zainal Fanani	Ketua
2.	H. Muhammad Nur	Anggota
3.	H. Muslihun	Anggota
4.	L. Isnandar Pademan	Anggota

### TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit:
  - a. Bidang Umum, meliputi:
    - 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang:
      - Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
      - Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
      - Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris.
      - Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS
    - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
    - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodic.
    - 4) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pedoman ini yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
  - b. Bidang Remunerasi, meliputi:
    - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi sehingga memenuhi kelayakan dan kepatutan serta tolak ukur yang wajar yang didasarkan atas:
      - Pertimbangan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan Remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang variable;
      - Kinerja Bank dan risiko;
      - Kewajaran dengan *peer group*;
      - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;

- Pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi, meliputi:
    - Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
  - 4) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (khusus untuk Dewan Komisaris tidak menerima insentif untuk menghindari adanya benturan kepentingan).
  - 5) Mengevaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Bidang Nominasi, meliputi:
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai system kerja prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
  - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS.
  - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang menjadi anggota Komite.
  - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;
    - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
    - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
    - d) Sistem serta prosedur pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
    - e) Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
    - f) Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Direksi dan DPS berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.
  4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## KONSULTAN YANG DIGUNAKAN BANK

Selama Tahun Buku 2019, Bank hanya menggunakan Jasa Konsultan Hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kantor	Tujuan Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja
1.	Advokat & Konsultan Hukum Emil Siain, SH & Rekan	Pelayanan Jasa Konsultan Hukum	Konsultan memberikan Pelayanan kepada Bank berupa: a. Jasa Konsultan Hukum untuk Bank. b. Pengurusan perizinan yang berkaitan dengan aspek hukum Perusahaan, termasuk HAKI (merk paten) bila diperlukan. c. Penyusunan draft dan/atau kontrak kerja perburuhan, peraturan perusahaan. d. Pendampingan atau wakil perusahaan selaku Kuasa Hukum, khususnya menyangkut persoalan hukum bidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan, serta bidang hukum terkait lainnya baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

## KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (*REMUNERATION PACKAGE*) YANG DITETAPKAN RUPS BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank NTB Syariah telah memiliki prosedur dalam menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Prosedur penetapan tersebut mengacu dengan sistem *single salary*. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komsiaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah periode Januari 2019 s/d Desember 2019 sebagaimana tabel berikut:

#### Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Anggota	Besaran (Rp)	Anggota	Besaran (Rp)	Anggota	Besaran (Rp)
Remunerasi	3	2.004.895.518	4	4.058.278.838	2	495.042.219
Fasilitas lain						
a. Dapat dimiliki	1		1		1	
b. Tidak dapat dimiliki						
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.004.895.518</b>	<b>4</b>	<b>4.058.278.838</b>	<b>2</b>	<b>495.042.219</b>

#### Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
1.	Di atas Rp. 2 Milyar	-	-	-
2.	Di atas Rp. 1 Milyar	-	3	-
3.	Di atas Rp. 500 juta s/d 1 Milyar	3	1	-
4.	Rp. 500 juta ke bawah	-	-	2

**Penjelasan Fasilitas Remunerasi lain berupa Fasilitas yang Diterima Tidak dalam Bentuk Keuangan (Natura) oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

1. Fasilitas Telekomunikasi

a. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	MSIDSN	Jumlah Transaksi (Rp)
1.	H. Zainal Fanani	Komisaris Utama	081156676	3.964.543

b. Direksi

No.	Nama	Jabatan	MSIDSN	Jumlah Transaksi (Rp)
1.	H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	081139403000	5.264.098
2.	H. Saharuddin	Direktur Pembiayaan	08123752305	8.128.905
3.	H. Ferry Satrio	Direktur Kepatuhan & MJR	08113940107	3.660.207
4.	Hj. Bq. Dien Rosana J.	Direktur Keuangan & Operasional	08123752295	7.808.195

2. Fasilitas Perumahan

No.	Nama	Jabatan	Biaya Sewa Menyewa Per Tahun (Rp)
1.	H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	75.000.000

3. Fasilitas Transportasi

No.	Nama	Jabatan	Vendor	Harga Sewa per Bulan (Rp)
1.	H. Zainal Fanani	Komisaris Utama	DAPEN PT Bank NTB Syariah	6.700.000
2.	H. Muhammad Nur	Komisaris	PT. Auto Bagus Rent A Car	6.545.000
3.	H. Muslihun	Komisaris Independen	DAPEN PT Bank NTB Syariah	6.700.000

## PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL (CSR)

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) di Bank NTB Syariah merupakan komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di samping itu juga sebagai kewajiban sebagai Badan Usaha Milik Daerah, untuk melaksanakan berbagai bentuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka menjadikan Bank NTB Syariah menuju perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*).

Dalam hal ini, Bank NTB Syariah senantiasa menunjukkan komitmen bagi tercapainya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program, dengan tujuan:

- ) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat;
- ) Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional;
- ) Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan;
- ) Mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat sekitar.

Landasan Perencanaan dan pelaksanaan program CSR Bank NTB Syariah dilakukan dengan menganggarkan dalam anggaran perusahaan setiap tahunnya dalam jumlah tertentu untuk digunakan bagi kepentingan umum yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyelaraskan pada program-program Pemerintah Daerah yang dilakukan sepenuhnya oleh Bank, antara lain dalam bidang sosial kemasyarakatan dan budaya, bidang pelestarian alam dan lingkungan hidup, bencana alam, keagamaan, pendidikan dan olah raga serta kegiatan social lainnya yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah yang menyatakan bahwa Dana CSR dianggarkan dari laba bersih;
3. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank NTB Syariah No: SK.01.22/64/104/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank NTB Syariah.

### Metode Pelaksanaan Program CSR

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank NTB Syariah terus mengembangkan standar dan pengelolaan CSR yang memberikan manfaat bagi pertumbuhan lingkungan dan sosial di Nusa Tenggara Barat.



Sedangkan untuk Penyaluran dana CSR harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency, fairness, patuh terhadap ketentuan, berdasarkan azas manfaat dan tepat guna bagi masyarakat luas serta prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Alokasi Anggaran Dana CSR Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal Anggaran Tahun 2019
<b>A. Pengelolaan Yang Bersinergi Dengan Program Pemerintah Daerah</b>		
1	Provinsi NTB	Rp 3.149.382.833,-
2	Kabupaten Sumbawa	Rp 703.443.241,-
3	Kabupaten Lombok Timur	Rp 708.914.775,-
4	Kabupaten Dompu	Rp 546.240.019,-
5	Kabupaten Lombok Tengah	Rp 498.014.263,-
6	Kabupaten Sumbawa Barat	Rp 363.200.809
7	Kabupaten Lombok Barat	Rp 245.825.605
8	Kabupaten Bima	Rp 314.906.767
9	Kabupaten Lombok Utara	Rp 301.745.590
10	Kota Matara,	Rp 217.648.782
11	Kota Bima	Rp 90.157.560
<b>Sub. Total (94%)</b>		Rp 7.139.480.244
<b>B. Pengelolaan Oleh Bank NTB Syariah</b>		
1	Kantor Pusat	Rp 455.711.505
<b>Sub. Total (6%)</b>		Rp 455.711.505
<b>Grand Total</b>		Rp 7.595.191.749

## Realisasi Program CSR

Bank NTB Syariah sebagai Bank milik masyarakat NTB menyadari bahwa dalam menjalankan bisnis tidak semata untuk mencari profit. Namun di samping itu, ada Misi yang diemban oleh Bank NTB Syariah yang tertuang dalam butir ke-5 yaitu memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.

Meningkatkan peran kepedulian sosial ini erat kaitannya dengan penyusunan program dan penyaluran dana CSR Bank NTB Syariah dengan tetap memperhatikan asas kepatuhan dan kewajaran. Harapan dari para stakeholders adalah program CSR Bank NTB Syariah tersebut dapat tepat sasaran dan memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB.

Wilayah NTB sepanjang tahun 2019 ini mengalami musim kemarau panjang, sehingga berdampak kepada kekeringan yang melanda banyak wilayah di NTB. Berdasarkan isu tersebut, Desk Sekretaris Perusahaan memfokuskan salah satu program penyaluran CSR tahun 2019 pada program bantuan air bersih dan penyediaan prasarana air bersih.

Selain itu, setiap tahunnya dunia pendidikan baik pendidikan formal maupun informal di NTB menjadi perhatian Bank NTB Syariah dalam menyusun program CSR, karena kami menyadari bahwa investasi masa depan NTB adalah SDM yang unggul serta memiliki akhlaqul qarimah, sehingga ke depannya akan banyak melahirkan para cendekiawan, pemimpin, pelaku usaha dan bankir yang berkualitas di NTB.

Dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat NTB, adalah dengan mengembangkan potensi yang terdapat di sekitar wilayah kita. Pada daerah NTB ini, sektor pariwisata menjadi andalan daerah, di dalamnya memiliki banyak turunan jenis usaha yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat NTB. Sektor pariwisata NTB pada tahun 2018 lalu sempat mengalami penurunan pasca gempa bumi yang melanda daerah-daerah di NTB. Sehingga, Bank NTB Syariah memberikan dukungan penuh melalui program-program CSR untuk mendukung kegiatan-kegiatan skala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di wilayah NTB. Serta beberapa bantuan pengobatan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan kemampuan Bank, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pemanfaatan alokasi dana CSR Bank NTB Syariah sesuai prioritas tahun 2019 sebagai berikut:



No	Realisasi Per Bidang CSR	Nominal Realisasi CSR	
		Bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Bank NTB Syariah
1.	Anggaran	7.139.480.244	455.711.505
2.	Realisasi		
	• Pendidikan	2.051.500.000	44.860.000
	• Keagamaan	1.208.500.000	17.500.000
	• Kesehatan	25.000.000	22.500.000
	• Olahraga	1.378.800.000	-
	• Bencana Alam	-	115.861.000
	• Pelestarian Alam	137.775.000	-
	• Masyarakat, Seni, dan Budaya	2.249.234.775	250.050.000
	<b>Total</b>	<b>7.050.809.775</b>	<b>450.771.000</b>
	<b>Presentase Realisasi</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,92%</b>

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Bank NTB Syariah menyadari bahwa tanpa adanya bumi yang sehat, niscaya Bank tidak dapat tumbuh dan berkembang. Bumi merupakan tempat kita hidup dan melakukan berbagai kegiatan usaha. Lebih dari pada itu, keberlangsungan bumi perlu dijaga untuk generasi yang akan datang. Atas dasar pemikiran ini, Bank senantiasa memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dengan berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan hidup yang dimulai dalam internal Bank NTB Syariah. Sebagai upaya Perusahaan untuk turut serta mengatasi isu masyarakat global, seperti perubahan iklim atau cuaca ekstrim, yang dalam beberapa tahun belakangan ini semakin sering melanda Bumi kita, seperti kemarau panjang, suhu dingin, banjir besar, tanah longsor dan sebagainya.

## Pelaksanaan Kegiatan

Bank NTB Syariah beserta seluruh jajaran memiliki komitmen penuh pada upaya pelestarian lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan untuk ikut menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kita miliki. Program internal perusahaan yang dijalankan untuk pelestarian lingkungan dengan menerapkan program **#save the world** yang merupakan bagian dari rencana Perusahaan dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kepedulian seluruh karyawan terhadap lingkungan. Beberapa program yang telah diterapkan oleh Bank NTB Syariah antara lain melalui kegiatan:

- Bank telah menerapkan penggunaan tumbler botol minuman karyawan di seluruh Kantor Cabang hal ini untuk memaksimalkan penggunaan air minum dalam kemasan;
- Bank secara bertahap memaksimalkan penggunaan listrik yaitu mengatur waktu nyala lampu dan *air conditioner* di Kantor pada jam kerja dan dimatikan apabila saat beristirahat maupun sepulang bekerja untuk menghemat penggunaan energi;
- Selain itu dilakukan efisiensi penggunaan kertas pada kegiatan administrasi sehari-hari yang tak mengharuskan penggunaan kertas baru dengan menerapkan penggunaan kertas bekas pakai yang memanfaatkan dua muka kertas (secara bolak balik) serta secara bertahap menerapkan penggunaan teknologi informasi yang bersifat *paperless*.

Tanggung jawab terhadap Lingkungan Hidup juga diaplikasikan pada bisnis bank antara lain:

- Dalam persyaratan pembiayaan Bank NTB Syariah, diisyaratkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bank NTB Syariah memiliki kebijakan untuk melarang pemberian pembiayaan yang merusak lingkungan;
- Pada bidang Dana, Bank NTB Syariah telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Teroris (APU-PPT) yang salah satu kewajibannya adalah melaporkan transaksi-transaksi yang melawan hukum termasuk di dalamnya transaksi bisnis terkait ilegal logging dan pencemaran lingkungan.

## Dampak

Bank NTB Syariah senantiasa untuk selalu memperhatikan, mengatur dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau menghindari dampak negatif bagi warga yang menetap atau bertempat tinggal di sekitar area lingkungan perusahaan. Selama tahun 2019, tidak terdapat pengaduan terkait dengan pencemaran lingkungan sehingga tidak ada informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

## Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Per 31 Desember 2019, Bank NTB Syariah belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan. Tetapi, Bank tetap berkomitmen untuk tetap melakukan berbagai kegiatan terkait program pelestarian lingkungan.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL DAN MASYARAKAT

Undang-undang Perseroan Terbatas merumuskan bahwa CSR bertujuan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Terkait dengan itu, Bank NTB Syariah terus melaksanakan program CSR dengan sungguh-sungguh. Agar semua program CSR berdampak luas dan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan masyarakat. Program CSR menjadi kewajiban Bank NTB Syariah sebagai bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi di tengah masyarakat. Bank NTB Syariah dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Demikian pula sebaliknya, perekonomian masyarakat tidak akan tumbuh tanpa adanya perusahaan. Bank NTB Syariah bukan saja bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi harus pula memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Pemangku Kepentingan lainnya termasuk masyarakat.

### Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2019, Bank NTB Syariah telah mengadakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang bencana alam, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya sebagai berikut:

#### 1. Program CSR Bidang Bencana Alam

Sepanjang tahun 2019, Bank NTB Syariah berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Barat antara lain di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima, Dompu melalui kegiatan sebagai berikut:

*dalam rupiah*

Tanggal	Kegiatan	Biaya
10 April 2019	Bantuan Korban Gempa Wilayah Lombok Timur	25.000.000
29 Juli 2019	Bantuan Kekeringan Wilayah Bima	11.477.000
8 Agustus 2019	Bantuan Air Bersih Wilayah Lombok Tengah	13.000.000
9 Agustus 2019	Penanggulangan Siaga Darurat Kekeringan Dompu	25.000.000
23 Agustus 2019	Bantuan Air Bersih Kekeringan Wilayah Lombok Timur	16.514.000
17 September 2019	Bantuan Air Bersih dan Peralatan untuk Kekeringan Wilayah Lombok Barat	24.870.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp115.861.000</b>

## 2. Program CSR Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank NTB Syariah turut serta berpartisipasi dalam upaya Pemerintah mencerdaskan bangsa melalui berbagai program CSR di bidang pendidikan yang menempati fokus utama dalam Program CSR Perusahaan. CSR di bidang Pendidikan ini meliputi kegiatan utama:

*dalam rupiah*

Tanggal	Kegiatan	Biaya
14 Februari 2019	Pembangunan/Rehabilitasi TPQ Al-Muhajirin Telaga Waru Pringgabaya	6.000.000
29 November 2019	Inisiasi Kegiatan Lomba Kaya Ilmiah oleh STKIP Taman Siswa Bima	25.000.000
3 Juli 2019	Dana Riset Ludes.id POS Lumbung Inovasi	13.860.000
<b>TOTAL</b>		<b>44.860.000</b>

## 3. Program CSR Bidang Keagamaan

Bank NTB Syariah turut berpartisipasi dalam bidang keagamaan yaitu pada kegiatan tahfidq Qur'an mendukung bidang keagamaan yaitu:

*dalam rupiah*

Tanggal	Kegiatan	Biaya
28 Maret 2019	Tahfidz Qur'an an. Muhammad Naja	5.000.000
	Tahfidz Qur'an an. Salma Salsabila	5.000.000
	Tahfidz Qur'an an. Muge Setiawan	5.000.000
5 April 2019	Tahfidz Qur'an an. Rizqy Hidayatullah	2.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>17.500.000</b>

## 4. Program CSR Bidang Kesehatan

Pada tahun 2019, bidang kesehatan merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus pengembangan program CSR Bank NTB Syariah yaitu dengan memberikan biaya pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan kebermanfaatn kepada para korban untuk membantu penyembuhan dan meringankan penderitaanya antara lain melalui kegiatan:

*dalam rupiah*

Tanggal	Kegiatan	Biaya
28 Januari 2019	Pengobatan Ibu Marean (Penderita Kanker Rahang)	5.000.000
23 May 2019	Pengobatan Wistan Jumani (Korban Kebakaran)	10.000.000
24 Juni 2019	Pengobatan Ustadz Nurdan	7.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>22.500.000</b>

#### 5. Program CSR idang Bidang Kemasyarakatan, Seni & Budaya

Program kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan dengan memberi perhatian khusus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menetapkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

*dalam rupiah*

Tanggal	Kegiatan	Biaya
11 Maret 2019	Korban Kebakaran di Desa Renda Kab. Bima	50.000.000
23 April 2019	Kegiatan Sosial Isbanda Bank NTB Syariah	32.000.000
22 Maret 2019	Modal kepada 15 Pelaku Usaha Perikanan/Budidaya Ikan Air Tawar	15.000.000
25 Oktober 2019	Inisiasi untuk Kegiatan Senggigi Sunset Jazz 2019	20.000.000
9 Juli 2019	Kegiatan Karang Taruna Indonesia "Taruna Jaya"	13.050.000
19 September 2019	Inisiasi Kegiatan Bikers Brotherhood MC Indonesia – Chapter Lombok	50.000.000
25 Oktober 2019	Inisiasi Kegiatan Rakernas Lazismu 2019	70.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>250.050.000</b>

#### Dampak

Bank NTB Syariah menyadari bahwa masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Sepanjang tahun 2019, Bank NTB Syariah menyusun program sosial kemasyarakatan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dampak positif bagi Bank NTB Syariah adalah meningkatkan citra Bank NTB Syariah di masyarakat,

sedangkan bagi masyarakat bermanfaat untuk pengembangan masyarakat NTB yang lebih baik.

## **TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**

Bank NTB Syariah memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kenyamanan bekerja bagi para karyawannya, karena merupakan aset utama perusahaan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha. Untuk itu Manajemen telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme karyawan dan kepastian jenjang karir melalui mekanisme penilaian kerja dan pemberian imbal jasa yang kompetitif dalam industri keuangan dan perbankan.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Bank NTB Syariah melakukan pengelolaan Sumber Daya Insani dengan baik, dengan memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan serta standar pemberian upah karyawan yang sesuai menjadi panduan Bank dalam memberikan berbagai manfaat kepada karyawannya, hak asasi manusia, pengakuan atas keberagaman, kesetaraan, dan peluang yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, dan gender.

#### **1. Kesejahteraan Karyawan**

Bank NTB Syariah senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan antara karyawan dengan Bank yang bersinergi untuk mencapai tujuan. Bentuk kesejahteraan pegawai yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dan dedikasi diantaranya dengan memberikan jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan pulsa, uang cuti, uang saku kepada pegawai yang beribadah, uang kematian, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, dan pinjaman pegawai. Bank NTB Syariah juga memberikan hak cuti karyawan baik untuk pria maupun wanita, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti nikah, dan cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan program pensiun, Bank NTB Syariah mengikutsertakan karyawannya dalam program pensiun iuran pasti dan program manfaat pasti.

#### **2. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan**

Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, Bank memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bekerjasama dengan beberapa vendor. Bank melakukan rangkaian program pembelajaran untuk membantu karyawan tumbuh dan berkembang, sehingga organisasi selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan lingkungan usaha yang kompetitif. Selama tahun 2019 telah diselenggarakan berbagai macam pelatihan yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

### 3. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Bank NTB Syariah menjamin kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan Karyawan. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan *fair* tanpa adanya intervensi dari kalangan internal dan eksternal. Dalam proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

### 4. Remunerasi Karyawan

Bank NTB Syariah memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawannya berdasarkan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbedaan pada satu level jabatan terjadi bila terdapat perbedaan atas kinerja, kompetensi atau pengalaman kerja. Terkait remunerasi, Bank NTB Syariah terus berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Berikut remunerasi selama tahun 2019:

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Ratio
1.	Rasio gaji karyawan tetap tertinggi dan terendah	21.408.216	2.725.000	12,73%
2.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	57.500.000	51.750.000	90%
3.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	40.250.000	36.225.000	90%
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tetap tertinggi	57.500.000	21.408.216	37,23%

### 5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank NTB Syariah senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat bagi para karyawan dalam rangka menciptakan produktivitas kinerja usaha yang optimal. Bank NTB Syariah juga berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan kerja para karyawan yang diwujudkan melalui:

- pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*medical checkup*) yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi keberadaan suatu penyakit yang diderita;
- Penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan;
- Pelarangan karyawan untuk merokok di dalam gedung kantor.

Selain itu, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memenuhi perlindungan karyawan atas berbagai macam risiko kecelakaan di tempat kerja seperti risiko kebakaran atau bencana alam.

## Dampak

Bank NTB Syariah menyadari bahwa Sumber Daya Insani merupakan aset utama Perusahaan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Bank. Dengan menerapkan tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan (K3) bagi karyawan akan berdampak secara psikologis untuk dapat bekerja secara nyaman, aman, dan sehat sehingga akan meningkatkan produktivitas.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PRODUK/JASA DAN NASABAH

Sebagai lembaga keuangan, selain tercapainya profitabilitas sesuai rencana bisnis tetapi juga diharapkan adanya tanggung jawab perusahaan kepada nasabah. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah terus berkomitmen untuk memberikan informasi tentang jasa dan produk keuangan yang ditawarkan secara lengkap dan komprehensif kepada nasabah. Bank NTB Syariah menyadari bahwa layanan berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis.

### Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilakukan Bank NTB Syariah terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap produk/jasa dan nasabah antara lain layanan pengaduan nasabah dan informasi produk.

#### 1. Layanan Pengaduan Nasabah

Bank NTB Syariah mengakui pentingnya layanan pelanggan yang efektif dan berkualitas tinggi. Dalam rangka untuk memastikan bahwa keluhan pelanggan ditangani dengan ramah, cepat, adil, sopan, dan efektif. Bank NTB Syariah memiliki unit yang mengelola pengaduan konsumen dan keluhan pelanggan melalui *Customer Service* yang terdapat pada setiap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank NTB Syariah, serta dapat menyampaikan melalui media sosial yang dikelola oleh Desk Sekretaris Perusahaan, seperti facebook dan Instagram.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui customers service sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Pengaduan Secara Lisan:
  - Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara lisan. Penerimaan pengaduan ini dikoordinir melalui *Customer Service* dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan Nasabah tersebut.
  - Petugas *Customer Service* mencatat dalam Register Pengaduan nasabah dan mengisi fomulir Pengaduan nasabah lain.



- Petugas *Customer Service* yang menerima Pengaduan nasabah dapat berkoordinasi dengan Wakil Pemimpin Cabang Utama Bidang Pelayanan/Wakil Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu dan wajib memberikan tanggapan/jawaban kepada Nasabah dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Setelah diselesaikan oleh *Customer Service*, maka *Customer Service* wajib melaporkan secara tertulis tentang pengaduan dan hasil penyelesaiannya kepada Pemimpin Cabang sesuai Formulir Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud Lampiran III Surat Keputusan ini.
- Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh Pemimpin Cabang ke Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.
- Dalam rangka menyelesaikan pengaduan Nasabah, Desk Sekretaris Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diadukan oleh Nasabah.
- Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf h adalah:
  - Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
  - Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau
  - Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf h wajib diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g berakhir.
- Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada Nasabah.

- Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.

b. Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis

- Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara tertulis. Penerimaan pengaduan ini dapat langsung ditujukan ke *Customer Service* dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan Nasabah tersebut beserta *fotocopy* tanda pengenal yang sah.
- Petugas *Customer Service* mencatat dalam Register Pengaduan nasabah dan diajukan kepada Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem, melalui Wakil Pemimpin Cabang Bidang Pelayanan/Wakil Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu.
- Pemimpin Cabang menugaskan *Customer Service* untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut dengan berkoordinasi dengan Penyelia Terkait, dimana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh Pemimpin Cabang ke Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.
- Dalam rangka menyelesaikan pengaduan Nasabah, Desk Sekretaris Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diadukan oleh Nasabah.
- Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf g adalah:
  - Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
  - Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau
  - Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.

- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir.
- Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada Nasabah.
- Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.
- Adapun terhadap pengaduan secara tertulis yang disampaikan langsung ke Direksi/Kantor Pusat Bank, maka Direksi dapat menugaskan Desk Sekretaris Perusahaan untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan Unit Kerja Terkait di Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu terkait dengan pengaduan nasabah, dimana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf g, huruf h dan huruf i.
- Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Nasabah dengan tembusan kepada Direksi.

Selama Tahun 2019, Desk Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen kepada OJK setiap periode Triwulan melalui aplikasi berbasis web “SI PEDULI”, dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Jumlah	Tindak Lanjut		
		Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses
Triwulan I	2559	2559	-	-
Triwulan II	2776	2776	-	-
Triwulan III	2210	2210	-	-
Triwulan IV	2996	2996	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>	-	-

## 2. Informasi Produk dan Layanan

Bank NTB Syariah menyediakan informasi lengkap tentang produk dan layanan melalui media cetak dan media elektronik. Selain itu, informasi terkait dengan produk dan layanan Bank dapat langsung melalui *customer service* yang berada di Kantor Cabang masing-masing Kantor atau menghubungi Call Center di nomor telepon 1500667. Selain

itu, untuk informasi produk dan layanan serta jaringan Kantor Cabang dan ATM dapat di akses melalui situs internet [www.bankntbsyariah.co.id](http://www.bankntbsyariah.co.id) dan media sosial lainnya.

### **Dampak**

Dengan melakukan program tanggung jawab sosial terhadap produk/jasa nasabah diharapkan nasabah merasa puas serta memberikan jaminan keamanan untuk bertransaksi di Bank NTB Syariah. Sehingga diharapkan loyalitas nasabah semakin meningkat kepada Bank NTB Syariah.

## FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut, apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.

Sesuai dengan ketentuan tata tertib Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

### Agenda Rapat Utama Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah membahas berbagai agenda baik dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Gabungan bersama Direksi, selama Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Z. Fanani	M. Nur	Muslihun
1.	8 Januari 2019	Penyampaian Program & Program Kerja Divisi SPI, Divisi KEP dan Desk MJR Tahun 2019 Bank NTB Syariah	√	√	√
2.	15 Januari 2019	Rapat Komite Audit Dekom Pembahasan Progress Hasil Pemeriksaan KAP 2018	√	√	√
3.	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) Dekom;</li> <li>▪ Evaluasi Kinerja BNTBS 2018 dan Penasehat 2019</li> </ul>	√	√	√
4.	29 Januari 2019	Rencana dan Langkah Strategis Pengawasan Likuiditas dan Target Penghimpunan dana RBB 2019	√	√	√
5.	13 Februari 2019	Membahas Laporan Semester II / 2018 (SKAI) SPI	√	-	√
6.	19 Februari 2019	Rapat Laporan Pengawasan Dekom Semester II / 2018 (KPR)	√	√	√
7.	26 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Remunerasi &amp; Nominasi (KRN) Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah;</li> </ul>	√	√	√

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Z. Fanani	M. Nur	Muslihun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piagam Audit &amp; DMTL Dekom dan Div SPI (Komite Audit dengan SKAI)</li> </ul>			
8.	27 Februari 2019	Kajian Hukum PT SMF & Tindak Lanjut atas Surat Direksi (Dewan Komisaris, Divisi KEP dan Desk MJR)	-	√	√
9.	12 Maret 2019	Pembahasan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018	√	√	√
10.	19 Maret 2019	Rapat Dewan Komisaris & Komite (Audit & Pemantau Risiko)	√	√	√
11.	20 Maret 2019	Konsep Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi NTB	√	√	√
12.	9 April 2019	Pembahasan <i>Annual Report</i> 2018 (Dewan Komisaris dan Komite)	√	√	√
13.	24 April 2019	Dewan Komisaris dan Komite Pembahasan BPP BMK NTB Syariah	√	√	√
14.	25 April 2019	Komite Remunerasi & Nominasi (KRN) Pembahasan Rekomendasi KRN terkait (calon) Divisi PBY	√	√	√
15.	14 Mei 2019	Dewan Komisaris dan Komite Persetujuan Hapus Buku Aktiva Tetap (Inventaris)	√	√	√
16.	24 Juni 2019	Pembahasan RBB Tahun 2019 – 2021 Perubahan	√	√	√
17.	9 Juli 2019	Pembahasan Profil Risiko	√	√	√
18.	23 Juli 2019	Evaluasi Tindak Lanjut Komitmen Hasil Temuan Audit Semester I/2019 dan Pembahasan Potensi Risiko Bank NTB Syariah	√	√	√
19.	31 Juli 2019	Rencana & Langkah Strategi Pencapaian Target Pembiayaan	√	√	√
20.	7 Agustus 2019	Pembahasan <i>Talent Management &amp; Succession Plan</i>	√	√	√
21.	21 Agustus 2019	Penasehatan Dewan Komisaris Terkait Penghimpunan Dana Retail & BMC	√	√	√
22.	30 September 2019	Pembahasan Penilaian/ <i>Assesment</i> Komite	-	√	√
23.	1 Oktober 2019	Pembekalan Calon Komisaris	-	-	√
24.	21 November 2019	Pembahasan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank NTB Syariah	√	√	√
25.	4 Desember 2019	RAKOMDIRBID Direktorat Keuangan & Operasional & Divisi APK BNTBS	√	√	√
26.	16 Desember 2019	Pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan BPKH	√	√	√

**Tabel Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi**

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Z. Fanani	M. Nur	Muslihun
1.	09 Januari 2019	Evaluasi kinerja Desember 2018	√	√	√
2.	13 Februari 2019	Evaluasi kinerja Januari 2019	√	√	√
3.	13 Maret 2019	1. Evaluasi kinerja Februari 2019 2. Presentasi hasil audit KAP atas Lap. Keuangan th. 2018	√	√	√
4.	10 April 2019	Evaluasi kinerja Bank NTB Syariah Maret 2019	√	√	√
5.	15 Mei 2019	Evaluasi kinerja BNTBS bulan April 2019	√	√	√
6.	21 Juni 2019	Evaluasi kinerja Mei & RBB Perubahan	√	Ijin/sakit	√
7.	17 Juli 2019	Evaluasi kinerja Bulan Juni 2019	√	√	√
8.	13 Agustus 2019	Evaluasi kinerja BNTBS bulan Juli 2019	√	√	√
9.	30 September 2019	Evaluasi kinerja Agustus 2019	Ijin/sakit	√	√
10.	16 Oktober 2019	Evaluasi kinerja September 2019	√	√	√
11.	06 November 2019	1. Evaluasi kinerja Oktober 2019 2. Rapat pembahasan RBB 2020-2022 3. Progress persiapan rakernas FKDK BPDSI	√	√	√
12.	11 Desember 2019	Evaluasi kinerja November 2019	√	√	√

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat**

Selama Tahun 2019, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah mengadakan 26 kali rapat Dewan Komisaris dan 12 kali rapat gabungan bersama Direksi, sehingga total Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 40 kali. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran		Total	Presentase*
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Gabungan		
Zainal Fanani	24	11	35	>100%
Muslihun	26	12	38	>100%
Muhammad Nur	25	11	36	>100%

\*Sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 kewajiban rapat dekom sebanyak 2 (dua) bulan sekali atau 6 (enam) kali setahun

## RAPAT DIREKSI

Penyelenggaraan rapat bagi anggota Direksi wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam sebulan untuk memastikan kemajuan dan kelancaran pengelolaan Perusahaan. Peraturan dan persyaratan mengenai rapat Direktur telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah.

### Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	08 Januari 2019	Rapat Pembahasan Program Kerja 2019	Dekom , Direksi, Div KEP, Desk MJR & Divisi SPI
2.	09 Januari 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Desember 2019	Dekom, Direksi, GM, DH & Komite Dekom
3.	29 Januari 2019	Rapat Pembahasan Evaluasi 2018 & Rencana 2019	Dekom, Direksi, GM, DH & Komite Dekom
4.	11 Februari 2019	Pembahasan Hasil Audit DPS	Direksi, Anggota DPS & Divisi
5.	13 Februari 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Januari 2019	Dekom, Direksi, GM & DH
6.	13 Maret 2019	Evaluasi kinerja Februari 2019 & Presentasi hasil Audit KAP atas Lap. Keuangan Th. 2019	Dekom, Direksi, GM, DH & TIM KAP DBSD&A
7.	10 April 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Bank NTB Syariah Bulan Maret 2019	Dekom, Direksi, DH & DH
8.	15 Mei 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Bank NTB Syariah Bulan April 2019	Dekom, Direksi, GM & DH
9.	11 Juni 2019	Rapat Kinerja DPK	Direksi,GM DRP & BM, DRP, JRL, Penyelia dana Cab. Se P Lombok
10.	11 Juni 2019	<i>Exit Meeting</i> OJK	Direksi, GM, DH & Tim OJK
11.	21 Juni 2019	Rapat Evaluasi Kinerja Mei 2019 & RBB Perubahan	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
12.	26 Juni 2019	Rapat Pembahasan KPI Pegawai	Direksi, GM, DH, BM & SBM se P Lombok
13.	03 Juli 2019	Kunjungan Kerja DPRD Kota Mataram	Direksi, GM & Anggota DPRD Kota Mataram



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
14.	05 Juli 2019	Kunjungan Kerja DPRD Sumbawa Barat	Direksi, GM & Anggota DPRD Sumbawa Barat
15.	15 Juli 2019	Program DPLK (Presentasi GM Div. SDI & Div. Umum)	Direksi, GM & Anggota DPRD Sumbawa Barat
16.	17 Juli 2019	Rapat Evaluasi Kinerja bulan Juni 2019	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
17.	13 Agustus 2019	Rapat Evaluasi Kinerja bulan Juli 2019	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
18.	26 Agustus 2019	Study Banding PT Bank Bengkulu	Direksi, GM, DH & Tim Bank Bengkulu
19.	02 September 2019	Pertemuan dengan Anggota DPD REI NTB	Direksi, GM & Tim DPD REI NTB
20.	06 September 2019	<i>Pra Exit Meeting</i> OJK	Direksi, GM, DH & Tim OJK
21.	17 September 2019	Rapat Evaluasi Kinerja PT Bank NTB Syariah Bln Agustus 2019	Direksi, GM, DH & Tim REN
22.	23 September 2019	Pertemuan dengan <i>Management</i> CIMB Niaga Syariah	Direksi, BM, DH & Tim CIMB Niaga Syariah
23.	30 September 2019	Rapat Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2019	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
24.	23 Oktober 2019	Rapat Pembahasan RBB 2020	Direksi, GM, DH
25.	29 Oktober 2019	Rapat Pembahasan RBB 2020 & ITSC	Direksi, GM, DH
26.	30 Oktober 2019	Rapat Evaluasi Kinerja bulan September 2019	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
27.	06 November 2019	Rapat Evaluasi Kinerja sd Oktober 2019, Pembahasan RBB 2020 & Progress Persiapan Rakernas FKDK BPD SI	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
28.	08 November 2019	<i>Exit Meeting</i> OJK	Direksi, GM, Perwakilan Divisi & Tim OJK
29.	02 Desember 2019	Restrukturisasi organisasi, Remaping Pembidangan Direksi & Rotasi dan Mutasi	Direksi & REN
30.	02 Desember 2019	Panel Direksi dalam rangka Pengisian Jabatan Lowong	Direksi
31.	10 Desember	Finalisasi Pembahasan MOU dengan	Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
	2019	PT Asuransi Jiwa TASPEN	
32.	11 Desember 2019	Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja November 2019	Dekom, Direksi, GM, DH, Anggota Komite Dekom
33.	23 Desember 2019	Kunjungan kerja Anggota DPRD NTB (Monitoring Sumber Pendapatan Daerah Th. 2019)	Direksi, GM & Anggota DPRD NTB

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Selama Tahun 2019, Direksi Bank NTB Syariah mengadakan 19 kali Rapat Direksi dan 14 kali Rapat Gabungan baik bersama Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		Total	Presentase
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan		
Kukuh Rahardjo		19	14	33	100%
Hj. Bq. Dien Rosana Juwita		19	14	33	100%
H. Ferry Satrio		19	14	33	100%
H. Saharuddin		19	14	33	100%

### RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS Bank NTB Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama Tahun 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Peserta Rapat
1	03 Januari 2019	Persiapan pemeriksaan ke seluruh Cabang semester ke-2	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
2	30 Januari 2019	Rapat Dewan Pengawas Syariah membahas Tata Tertib DPS	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
3	31 Januari 2019	Pemeriksaan Semester II di kantor Cabang Utama Pejanggik	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
4	04 Februari 2019	Menyiapkan Bahan Laporan Tahunan DPS	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
5	11 Februari 2019	<i>Exit Meeting</i> bersama Direksi, GM, DRP, PBY, JKE, dll tentang hasil pemeriksaan DPS Semester II	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Peserta Rapat
6	12 Februari 2019	Persiapan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II 2018	Ketua DPS & Sekretaris
7	18 Februari 2019	Penyelesaian Opini tentang Pemilihan Putri Mandalika	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
8	22 Februari 2019	Pembahasan awal Laporan Hasil Pemeriksaan DPS Semester II 2019	Ketua DPS & Sekretaris
9	25 Februari 2019	Perbaikan Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2018	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
10	26 Februari 2019	Pembahasan Final atas Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2018	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
11	04 Maret 2019	Persiapan bahan penyempurnaan Laporan DPS ke OJK tentang Produk Pelayanan Jasa	Ketua DPS & Sekretaris
12	11 Maret 2019	Persiapan bahan penyempurnaan Laporan DPS ke OJK	Ketua DPS & Sekretaris
13	12 Maret 2019	Penyusunan Revisi Laporan Produk Pelayanan Jasa ke OJK	Ketua DPS & Sekretaris
14	26 Maret 2019	Pembahasan perubahan Opini DRP	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
15	02 April 2019	Opini Direktur dana dan Jasa (Perubahan)	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
16	09 April 2019	Rapat DPS membahas pembinaan dan pembekalan bagi semua Staf Bank NTB Syariah	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
17	16 April 2019	Rapat DPS tentang realisasi pembinaan ke Cabang Bank NTB Syariah dll	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
18	11 Juni 2019	Membahas Opini ke Pemenang tentang Pembiayaan Serbaguna (PSG) dan Murabahah	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
19	18 Juni 2019	Pembinaan di KC Karang Jangkong, Mataram dan Sweta	Ketua DPS & Sekretaris
20	06 Agustus 2019	Rapat membahas masalah Opini DRP dan pengeditan hasil pemeriksaan	Ketua DPS & Sekretaris
21	15 Agustus 2019	Membahas opini permintaan dari DRP tentang kegiatan <i>Cobrand</i> dll	Ketua DPS & Sekretaris
22	20 Agustus 2019	Pembahasan awal Laporan Hasil pemeriksaan Semester I 2019	Ketua DPS & Sekretaris

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Peserta Rapat
23	22 Agustus 2019	Pembahasan akhir Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I 2019	Ketua DPS & Sekretaris
24	27 Agustus 2019	Finalisasi Laporan hasil pemeriksaan Semester I 2019	Ketua DPS & Sekretaris
25	28 Agustus 2019	Rapat bersama Dirut, Divisi DRP, Staf Pembiayaan Divisi JRL terkait dengan hasil Pemeriksaan DPS Semester I 2019 dan usulan kepada Divisi Pembiayaan untuk mengadakan perbaikan terhadap SOP	Ketua DPS & Sekretaris
26	03 September 2019	Membahas permintaan Opini DPS oleh Divisi Pembiayaan Perihal permohonan opini atas penambahan Syirkah Bank atas biaya pengikatan agunan pada pembiayaan Musyarakah	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
27	24 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana menghadiri semiloka DSN;</li> <li>▪ Opini Div. Pembiayaan tentang Sindikasi PDAM Giri Menang</li> </ul>	Ketua DPS, Anggota & Sekretaris
28	07 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat bersama deligasi Study Banding dari Bank Nagari Padang ;</li> <li>▪ Membahas Opini dari Divisi DRN tentang Dompot Digital</li> </ul>	Ketua DPS, Anggota, staf ahli DPS & Sekretaris
29	11 Oktober 2019	Konsultasi dengan Dirum tentang permintaan Opini Kerjasama dengan BANK NTB <i>Live</i>	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris
30	15 Oktober 2019	Membahas Opini Divisi Keuangan dan Operasional DII	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris
31	22 Oktober 2019	Membahas Permohonan Opini dari Direktur Keuangan dan Operasional Tentang PKS dengan DPLK BNI	Ketua DPS, Anggota, staf ahli DPS & Sekretaris
32	31 Oktober 2019	Membahas Opini Div. Pembiayaan Tentang Pembiayaan kepada ASN dengan Menggunakan Akad Qard Wal Ijarah	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris
33	07 November 2019	Pembinaan di KC Pejangik	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris
34	19 November 2019	Membahas Jadwal Pembinaan dan Opini DPS untuk Divisi SDI	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	Peserta Rapat
35	28 November 2019	Evaluasi Hasil pembinaan Semester II 2019	Ketua DPS, staf ahli DPS & Sekretaris
36	10 Desember 2019	Persiapan Materi Bisnis <i>Review</i>	Ketua DPS, Anggota, staf ahli DPS & Sekretaris

Sepanjang Tahun 2019, DPS Bank NTB Syariah mengadakan 36 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Rapat DPS		
		Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentase Tingkat Kehadiran (%)
Rubai Ahmad Munawar	Ketua	36	36	100%
Hudatullah Muhibuddin	Anggota	36	17	49%
Syarip Fuad Abdul Aziz	Staf Ahli DPS	36	8	24%
Sunti Wahyunissoleh	Sekretaris DPS	36	36	100%

## JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN

### LAPORAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Untuk pencegahan dan pemberantasan *fraud*, Bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program seperti pelatihan *fraud awareness*, *audit internal*, *quality assessment*, *Know Your Employee*, *tone of the top* dan komitmen manajemen senior melalui e-mail kepada seluruh karyawan sudah dijalankan secara rutin. Sepanjang tahun 2019, jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Penyimpangan Internal	Pengurus		Pegawai		Pegawai Tidak Tetap	
		Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
1.	Jumlah Penyimpangan	-	-	2	3	-	-
2.	Telah diselesaikan Internal Bank	-	-	1	3	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	1	-	-	-
4.	Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
5.	Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

### LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDI anggota Divisi Satuan Pengawasan Intern dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi personil/SDI yang dimilikinya sehingga lebih berkualitas dan kompeten disertai pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil audit sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam membantu manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

## PERKARA HUKUM

Sepanjang tahun 2019, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	3	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

## **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Guna menjaga kepentingan Pemegang Saham, Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku yang wajib dipatuhi oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Sepanjang Tahun 2019, tidak terdapat masalah benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan, yakni anjuran tidak menerima hadiah dimasa lebaran yang disampaikan melalui media internal kepada seluruh Pengurus dan Pegawai Bank NTB Syariah.

Namun demikian, terlampir pada halaman berikutnya penjelasan terkait transaksi penyaluran pembiayaan kepada Pemegang Saham/Pengurus/Dewan Pengawas Syariah/Pejabat Eksekutif Bank.



## ***BUYBACK SHARE DAN BUYBACK OBLIGATION***

Berdasarkan pada SE BI Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *Buy back shares* dan *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2019, Bank tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

## PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/01/64/0003/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang SOP Pengelolaan Program Dana Kebajikan PT Bank NTB Syariah. Dalam SOP tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Kebajikan adalah dana Bank yang bersumber dari *ujrah* Asuransi atas kemitraan Bank NTB Syariah digunakan untuk dalam *charity* program (sumbangan & sponsor) dan/atau *Community Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan Pengembangan Kelompok Produktif yang dinyatakan dengan satuan uang rupiah yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi Bank dan/atau objek yang diberikan bantuan dana.
2. Program Dana Kebajikan secara umum ditujukan untuk:
  - a. Program Sosial Masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Bank NTB Syariah sebagai wujud nyata partisipasi, perhatian dan kepedulian Bank dalam membantu masyarakat dan lingkungan Bank.
  - b. *Charity Program* (sumbangan & sponsor) dan/atau *Community Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan pengembangan Kelompok Produktif.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan Bank NTB Syariah Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode</b>	<b>1,348,266,360</b>
2.	<b>Penerimaan Dana Kebajikan</b>	-
	a. Infaq	514,876,381
	b. Sedekah	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-
	d. Denda	17,418,372
	e. Penerimaan non Halal	-
	f. Lainnya	<b>1,629,621,582</b>
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>2,161,916,335</b>

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
3.	<b>Penggunaan Dana Kebajikan</b>	-
	a. Dana Kebajikan Produktif	-
	b. Sumbangan	2,057,886,580
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	47,500,000
	<b>Total Penggunaan</b>	<b>2,105,386,580</b>
4.	<b>Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan</b>	<b>56,529,755</b>
5.	<b>Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode</b>	<b>1,404,796,115</b>

## LAPORAN SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG PT BANK NTB SYARIAH

### POSISI DESEMBER 2019

#### A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komposisi, Kriteria Dan Independensi Dewan Komisaris	1

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi	1

#### Analisis:

Dewan Komisaris memiliki keahlian perbankan syariah, hukum/ketentuan fiqh perbankan syariah, managerial, bertindak independen karena tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan dengan sesama Anggota Dewan komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang sesuai jumlah minimal Dewan Komisaris dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	1

#### Analisis:

Ya. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia & didukung dengan dokumen domisili yang sah dan masih berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	1

#### Analisis:

Ya. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, tidak tercantum dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak memiliki benturan kepentingan, memiliki kompetensi sebagai Dewan Komisaris (Banker Bank nasional, Akademisi, dan Pejabat Pemerintah) serta tidak memiliki pembiayaan/hutang dengan kolektibilitas non lancar dan tidak pailit atau memiliki reputasi keuangan yang baik.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	1

**Analisis:**

Ya. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 2 orang dari 3 orang anggota Dewan Komisaris, yaitu: 1 orang Komisaris Utama Independen dan 1 orang Komisaris Independen.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS	1

**Analisis:**

Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:

- a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen	1

**Analisis:**

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan	1

**Analisis:**

Komisaris Independen Bank tidak ada yang berasal dari Direksi Bank sehingga tidak menjadi subyek masa *cooling off* 6 bulan.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada BUS yang sama	1

**Analisis:**

Ya. Anggota Dewan Komisaris kategori Independen hanya mengetuai paling banyak 2 komite Dewan Komisaris. Komisaris Utama Independen mengetuai Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komisaris Independen mengetuai Komite Pemantau Risiko.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
10	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	1

**Analisis:**

Ya. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan/atau Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
----	---------------	----------

2	Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi baik secara langsung maupun melalui perangkat Dewan Komisaris (Komite). Pelaksanaan tugas tersebut disampaikan melalui rapat dengan Pengurus serta melalui surat-surat penasehatan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif melalui terpenuhinya *governance structure, governance proces, governance outcome*.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab (kebijakan strategis) Direksi. Pengawasan Dewan Komisaris antara lain melalui Rapat Direksi-Dekom, Rapat Dekom-Direktur Bidang, Rapat Dekom-Unit Kerja Divisi. Agenda rapat meliputi Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengendalian Internal.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris senantiasa melakukan tugas pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis Bank oleh Direksi. Bentuk pengawasan, pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis Bank adalah dengan melakukan pengkajian dan memberi persetujuan atas seluruh kebijakan strategis Bank antara lain kebijakan pengendalian internal, kebijakan manajemen Risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan penggunaan teknologi informasi, kebijakan akuntansi, kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Insani, dan sebagainya. kebijakan pengadaan barang & jasa, bidang IT termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan komitmen Bank. Contoh: Setiap bulan Dewan Komisaris mengagendakan rapat dengan Direksi membahas kinerja pelaksanaan RBB Bank.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.	1

**Analisis:**

Ya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional bank. Wewenang Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pembiayaan kepada Direksi belum diatur dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS. Sampai dengan akhir tahun 2018 belum ada permohonan pembiayaan dari anggota Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor eksternal.	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris memantau dan mengawasi daftar monitoring tindaklanjut temuan audit internal dan eksternal (DMTL) oleh Direksi dan seluruh jajaran bank. DMTL temuan audit saat ini tersisa sejumlah 1.436 Temuan Eksternal (98.69%) dan 986 Temuan Internal (87.64%).

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
----	---------------	----------



6	Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS	1
---	---	---

**Analisis:**

Sampai dengan tanggal laporan, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan syariah sehingga dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS. Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Komisaris tidak melakukan pelaporan tertulis ke OJK atas hal tersebut.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG	1

**Analisis:**

Ya. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris selalu berlandaskan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional dan Fairness.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi	1

**Analisis:**

Ya. Dewan Komisaris telah menetapkan keanggotaan komite komite di organ Dewan Komissaris. Keanggotaan komite komite tersebut telah Dewan Komisaris meminta penetapan kepada Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
10	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif	1

**Analisis:**

Ya. Komite komite tersebut telah menjalankan tugas antara lain melakukan telaahan atas pelaksanaan dan hasil audit, manajemen risiko dan pembuatan pedoman nominasi. Komite komite tersebut rutin menyelenggarakan rapat sesuai pedoman dan tata tertib kerja Komite.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
11	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/DK/01.22/09/2018 tanggal 25 September 2018 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal	1

**Analisis:**

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris pasal tentang Etika dan Waktu Kerja. Dewan Komisaris menetapkan waktu kerja minimal 2 hari kerja dalam satu minggu dan menetapkan hari Rabu menjadi hari semua anggota Dewan Komisaris hadir untuk membahas semua tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan	1

**Analisis:**

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala (minimal 1 kali dalam 2 bulan) dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris memutuskan hasil hasil pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. Rapat Dewan Komisaris memutuskan secara musyawarah dan mufakat dan sampai tanggal laporan tidak terjadi *disenting opinion*.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Rapat Dewan Komisaris dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris	1

**Analisis:**

Sampai dengan tanggal laporan, rapat rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh 100% anggota Dewan Komisaris.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris	1

**Analisis:**

Ya. Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas	1

**Analisis:**

Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat. Notulen terlampir. Sampai tanggal laporan tidak terdapat *dissenting opinion*.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik	1

**Analisis:**

Ya. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan sebagai rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi	1

**Analisis:**

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam surat penasehatan kepada Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Transparansi Dewan Komisaris	1

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada BUS yang bersangkutan.</li> <li>2. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali anggota, anggota Dewan Komisaris lain</li> </ul>	1

	<p>dan/atau anggota Direksi.</p> <p>3. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain</p> <p>4. remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan GCG.</p>	
--	---	--

**Analisis:**

Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:

1. Tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada BUS yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali anggota, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
3. Tidak merangkap jabatan pada perusahaan bidang keuangan atau 1 perusahaan non keuangan.
4. remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan GCG.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS	1

**Analisis:**

Ya. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1

**Analisis:**

Ya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

## B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komposisi, Kriteria Dan Independensi Direksi	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang	1

### Analisis:

Jumlah anggota Direksi saat ini adalah 4 (empat) orang

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	1

### Analisis:

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga	1

### Analisis:

Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	2

**Analisis:**

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi	1

**Analisis:**

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan	1

**Analisis:**

Direksi tidak sedang melakukan rangkap jabatan yang dilarang dalam PBI tentang pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	1

**Analisis:**

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris	1

**Analisis:**

Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	1

**Analisis:**

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah	2

**Analisis:**

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Direksi mengelola BUS sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2

**Analisis:**

Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
----	---------------	----------



3	Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	2
---	---	---

**Analisis:**

Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan	1

**Analisis:**

Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan auditor ekstern	2

**Analisis:**

Direksi senantiasa berusaha untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, yang ditunjukkan dengan tindak lanjut komitmen dengan otoritas

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	2

**Analisis:**

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis	2

**Analisis:**

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku	2

**Analisis:**

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali :

1. untuk proyek yang bersifat khusus;
2. didasari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya;
3. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi	1

**Analisis:**

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
10	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS	1

**Analisis:**

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
11	Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.	1

**Analisis:**

Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
12	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat.	1

**Analisis:**

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/11/64/009A/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Efektivitas Rapat Direksi	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi	2

**Analisis:**

Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga selalu melalui mekanisme rapat Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas	2

**Analisis:**

Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik	2

**Analisis:**

Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti	2

**Analisis:**

Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Tranparansi Direksi	1

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	<p>Anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>2. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang</li> </ol>	1

	saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya; dan 3. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	
--	---	--

**Analisis:**

Anggota Direksi telah mengungkap dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan :

- Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)
- hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/ayau anggota Direksi lainnya; dan
- remunerasi dan fasilitas lain.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Direksi tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS	2

**Analisis:**

Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1

**Analisis:**

Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

### C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Dan Independensi Anggota Komite	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komite Pemantau Risiko a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Pihak Independen ahli di bidang keuangan, 1 orang ahli di bidang keuangan dan 1 orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Komite Pemantau Risiko b. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Komite Pemantau Risiko c. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	1

**Analisis:**

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Komite Pemantau Risiko d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.	1

**Analisis:**

Lebih dari 51 % anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Komite Pemantau Risiko e. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik.	2

**Analisis:**

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral serta reputasi keuangan yang baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Komite Remunerasi dan Nominasi a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Komite Remunerasi dan Nominasi b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak berasal dari anggota Direksi.	1

**Analisis:**

Anggota Komite remunerasi dan Nominasi tidak berasal dari anggota Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Komite Remunerasi dan Nominasi c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	1

**Analisis:**

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Komite Remunerasi dan Nominasi d. Apabila BUS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah, maka:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi BUS; dan</li><li>2. Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan BUS.</li></ol>	1

**Analisis:**

Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
10	Komite Audit a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan



NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
11	Komite Audit b. Anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
12	Komite Audit c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	1

**Analisis:**

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Utama Independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
13	Komite Audit d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen.	1

**Analisis:**

Lebih dari 51 % anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
14	Komite Audit e. Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	1

**Analisis:**

Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral serta reputasi keuangan yang baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
15	Rangkap Jabatan Anggota Komite	1

	a. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen yang merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BUS yang sama, pada bank lain, dan/atau pada perusahaan lain, telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlian, kerahasiaan Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
--	---	--

**Analisis:**

Anggota Komite Bank yang berasal dari Pihak Independen tidak merangkap jabatan pada Perusahaan lain

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
16	Rangkap Jabatan Anggota Komite b. Ketua komite dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BUS yang sama.	2

**Analisis:**

Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Utama Independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
17	Independensi Anggota Komite a. Seluruh Pihak Independen anggota Komite merupakan pihak di luar BUS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.	1

**Analisis:**

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
18	Independensi Anggota Komite	1

	b. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawas telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.	
--	--	--

**Analisis:**

Seluruh Pihak Independen Anggota Komite tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Tugas Dan Tanggung Jawab Komite	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;	2

**Analisis:**

Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko senantiasa aktif dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, yang dilaksanakan secara berkala (setiap 3 bulan)

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;	2

**Analisis:**

Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko senantiasa aktif dalam memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p>	2

**Analisis:**

Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko senantiasa aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:</p> <p>a. terkait dengan kebijakan remunerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;</li> <li>2. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan</li> <li>3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan</li> <li>4. dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.</li> </ol>	2

**Analisis:**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a. terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
4. dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: b. terkait dengan kebijakan nominasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;</li> <li>2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;</li> <li>3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.</li> </ol>	2

**Analisis:**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:

b. terkait dengan kebijakan nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Komite Audit a. Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh	2

	Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	
--	--	--

**Analisis:**

Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, berjalan efektif namun ada kelemahan minor yang segera dapat diselesaikan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Komite Audit b. Komite Audit melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.	2

**Analisis:**

Komite Audit telah mereview : Pelaksanaan tugas SKAI; Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; dan Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan berjalan efektif, meskipun terdapat kelemahan minor dalam pelaksanaannya namun dapat segera diselesaikan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Komite Audit c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.	1

**Analisis:**

Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Efektivitas Rapat Komite	2

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.	2

**Analisis:**

komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Pedoman dan tata tertib kerja komite telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala	2

**Analisis:**

Pedoman dan tata tertib kerja komite telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik	2

**Analisis:**

Hasil risalah rapat telah dibuat dan telah mengungkapkan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) serta telah didokumentasikan dengan baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Hasil rapat Komite telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris	2

**Analisis:**

Sebagian besar dari hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris yang didukung dengan daftar hadir dan notulen rapat

#### D. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Komposisi, Kriteria Dan Independensi Dps	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi	1

**Analisis:**

anggota DPS Bank berjumlah 2 (dua) orang.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	2

**Analisis:**

seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi	2

**Analisis:**

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan	1



	telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	
--	---	--

**Analisis:**

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah lulus ujikompetensi dan seluruhnya telah memperoleh surat persetujuan dari DSN MUI serta telah memperoleh persetujuan dari RUPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris	2

**Analisis:**

Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain	1

**Analisis:**

Anggota DPS tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Tugas Dan Tanggung Jawab Dps	2

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG	2

**Analisis:**

DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran	2

	kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah	
--	--	--

**Analisis:**

DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan kesyariahan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BUS	1

**Analisis:**

Dewan Pengawas Syariah telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru BUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	2

**Analisis:**

DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BUS yang belum ada fatwanya	2

**Analisis:**

DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana	2

	serta pelayanan jasa BUS	
--	--------------------------	--

**Analisis:**

DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan	1

**Analisis:**

DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK Perwakilan NTB

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal	3

**Analisis:**

Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Efektivitas Rapat Dps	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	1

**Analisis:**

DPS menyelenggarakan rapat secara rutin 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap keputusannya selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat	1

**Analisis:**

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik	2

**Analisis:**

Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi	2

**Analisis:**

Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Transparansi Dps	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Anggota DPS telah mengungkapkan:	1

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan</li> <li>2. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.</li> </ol>	
--	--	--

**Analisis:**

Tidak ada anggota DPS yang merangkap jabatan di lembaga keuangan lainnya juga tidak merangkap jabatan sebagai konsultan pada BUS maupun UUS.

DPS akan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan Tahunan Pelaksanaan GCG.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS	1

**Analisis:**

Anggota DPS tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1

**Analisis:**

Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS	1

**Analisis:**

Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS

**E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah**

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Produk yang dimiliki oleh BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.	2

**Analisis:**

Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Pelaksanaan produk penghimpunan dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	2

**Analisis:**

Pelaksanaan produk penghimpunan dana Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Pelaksanaan produk penyaluran dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	2

**Analisis:**

Pelaksanaan produk penyaluran dana Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Pelaksanaan produk pelayanan jasa BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan	2

	ketentuan Bank Indonesia.	
--	---------------------------	--

**Analisis:**

Pelaksanaan produk pelayanan jasa BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Penyelesaian sengketa antara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1

**Analisis:**

Penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan atau melalui lembaga peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Penanganan Benturan Kepentingan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :  1. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS; 2. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.	2

### Analisis:

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasi dengan baik.	1

### Analisis:

selama periode laporan, Bank tidak pernah mengalami Benturan Kepentingan sehingga Pengurus dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan untuk penanganannya

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	1

### Analisis:

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank



### G. Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh RUPS.	1

**Analisis:**

Bank telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko yang diangkat oleh RUPS

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja kepatuhan sesuai dengan ukuran BUS.	2

**Analisis:**

Bank telah membentuk Divisi Kepatuhan yang senantiasa berusaha bersikap independen terhadap satuan kerja operasional, sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direksi tentang BPP Kepatuhan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	2

**Analisis:**

Divisi Kepatuhan Bank telah didukung oleh personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:	2

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;</li> <li>2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;</li> <li>3. memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.</li> </ol>	
--	---	--

**Analisis:**

Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia/OJK.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Fungsi kepatuhan telah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi.	1

**Analisis:**

Divisi Kepatuhan Bank bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	2

**Analisis:**

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko senantiasa berusaha mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.	1

**Analisis:**

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.	1

**Analisis:**

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan Juli dan Januari

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.	2

**Analisis:**

selama periode laporan, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko tidak pernah menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
10	Direksi telah:  1. Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. 2. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. 3. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.	1

**Analisis:**

Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif berupa penerbitan SK Direksi.

Direksi telah bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, Pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait, melalui sosialisasi dan pembinaan oleh unit terkait (antara lain : Kredit, TSI, Kepatuhan, MJR)

Direksi telah menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan, melalui adanya kajian dan pertimbangan - pertimbangan dari Divisi Kepatuhan - Desk MJR dalam kegiatan usaha Bank. memastikan seluruh fungsi kepatuhan berjalan dengan efektif serta dilakukan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan

## H. Penerapan Fungsi Audit Intern

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif.	2

### Analisis:

Bank senantiasa berusaha menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	BUS telah memiliki standar audit intern, paling kurang: a. memiliki piagam audit intern (internal audit charter); b. memiliki fungsi audit intern; dan c. panduan audit intern.	1

### Analisis:

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan : - Menyusun Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter) - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) - Menyusun Panduan Audit Intern

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	BUS telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan ukuran BUS.	2

### Analisis:

Bank telah membentuk Kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1

**Analisis:**

Fungsi SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Pimpinan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.	1

**Analisis:**

Pimpinan SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	2

**Analisis:**

Proses penyediaan sumberdaya yang berkualitas pada SKAI telah dilaksanakan secara bertahap melalui program *assessment*, diklat dan sertifikasi *Qualified Audit (QIA)* oleh Lembaga yang Kompeten (YPIA) khususnya terhadap Pegawai yang saat ini sudah menjadi Auditor/KIC maupun kepada Pegawai yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan menjadi calon Auditor/KIC, dan seluruh Pegawai SKAI telah diikutsertakan dalam Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Fungsi audit intern telah melaksanakan tugas membantu Direktur Utama antara lain:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja BUS termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah;</li><li>2. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan</li></ol>	2

	keefektifan sistem pengendalian intern.	
--	---	--

**Analisis:**

SKAI telah melaksanakan tugas membantu Direktur Utama antara lain:

1. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja Bank termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah;
2. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
8	Fungsi audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan	2

**Analisis:**

SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan-

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
9	Fungsi audit intern menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.	3

**Analisis:**

SKAI akan menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS

## I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS.	1

### Analisis:

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.	1

### Analisis:

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh BUS tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	1

### Analisis:

Penunjukan Akuntan publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja.	1

### Analisis:

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerjasama



NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BUS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.	1

**Analisis:**

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Bank, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
6	Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BUS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BUS.	1

**Analisis:**

Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
7	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BUS tepat waktu;</li> <li>2. mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</li> </ol>	1

**Analisis:**

Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* secara tepat waktu serta mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

#### J. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait.	1

##### **Analisis:**

Kepastian penyediaan dana oleh Bank kepada Pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :- Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	BUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait.	1

##### **Analisis:**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang jelas dan memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	1

##### **Analisis:**

Bank telah Melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku secara berkala

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	BUS tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	2

**Analisis:**

Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	BUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	2

**Analisis:**

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan Bank dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia/OJK

**K. Transparansi Kondisi Bank Umum Syariah, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dan Pelaporan Internal**

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	Penerapan Transparansi Kondisi Bank Umum Syariah	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.	1

**Analisis:**

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* melalui RUPS termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan melalui media cetak lokal, homepage dan media lainnya serta melaporkannya kepada Bank Indonesia/OJK sesuai ketentuan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	BUS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia;</li> <li>2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>5. LPPI;</li> <li>6. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; dan</li> <li>7. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan,</li> </ul> serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di homepage bank, bagi yang memiliki homepage.	1

**Analisis:**

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dengan sangat lengkap dan tepat waktu kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam PBI tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

yaitu kepada :a) Bank Indonesia/OJK; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) LPPI; f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; dan g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan, serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada homepage Bank Indonesia.	2

**Analisis:**

Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada homepage Bank Indonesia.	1

**Analisis:**

Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada homepage Bank Indonesia/OJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	BUS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	1

**Analisis:**

Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah sesuai ketentuan PBI/POJK

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
----	---------------	----------

6	BUS telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	1
---	--	---

**Analisis:**

Bank senantiasa menyampaikan tata cara pengaduan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa kepada seluruh nasabah Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance	1
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1

**Analisis:**

Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	BUS telah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG.	1

**Analisis:**

Bank telah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, BUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	1

**Analisis:**

Dalam hal terdapat perbedaan dalam hasil penilaian *self assessment* pada Laporan Pelaksanaan GCG oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Bank akan senantiasa merevisinya dan menyampaikannya secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode terdekat serta mempublikasikannya pada *homepage* Bank

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	BUS telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia;</li> <li>2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>3. Lembaga pemeringkat di Indonesia;</li> <li>4. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas);</li> <li>5. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan</li> <li>6. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan,</li> </ol> secara lengkap dan tepat waktu.	1

**Analisis:**

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada:

1. Bank Indonesia/OJK;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
4. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas);
5. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
6. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan,

secara lengkap dan tepat waktu.

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
5	Apabila BUS telah memiliki homepage, BUS menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage secara tepat waktu.	1

**Analisis:**

Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage secara tepat waktu

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
----	---------------	----------

3	Kecukupan Pelaporan Internal	2
NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
1	BUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	2

**Analisis:**

Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu namun belum sepenuhnya didukung oleh SIM yang handal

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
2	Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	2

**Analisis:**

Bank berusaha menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu meskipun belum sepenuhnya didukung oleh SIM yang handal

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
3	BUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	2

**Analisis:**

Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai meskipun di dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten

NO	NAMA KOMPONEN	PREDIKAT
4	BUS memiliki IT security system yang memadai.	2

**Analisis:**

Bank telah memiliki IT Security System yang memadai, sesuai dengan kompleksitas usaha Bank



### RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BAGI BANK UMUM SYARIAH

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.125
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	17.50%	0.35
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	10.00%	0.1
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10.00%	0.2
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10.00%	0.1
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5.00%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern	1	5.00%	0.05
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5.00%	0.05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05

11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	15.00%	0.15
	<b>Nilai Komposit</b>		<b>100.00%</b>	1.275